



**DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN PTSP**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2023



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/ kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 – 2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disajikan masih jauh dari sempurna, sehingga kami selaku penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi perbaikan selanjutnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini disusun, Semoga dapat bermanfaat bagi DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara pada khususnya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan masyarakat secara keseluruhan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Kutai Kartanegara, Februari 2024

Kepala

Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kabupaten Kutai Kartanegara,



ALFIAN NOOR, SE., M. LING.

Pembina Utama Muda - IV/c

NIP. 19690113 199503 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I. Latar Belakang.....	2
II. Dasar Hukum.....	3
III. Tugas dan Fungsi.....	4
IV. Permasalahan dan Isu Strategis.....	7
V. Uraian Singkat Organisasi.....	11
VI. Sumber Daya Manusia.....	12
VII. Sarana Prasarana.....	30
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	31
I. Perencanaan Strategis.....	31
II. Telaahan Visi Misi Kepala Daerah.....	31
III. Tujuan dan Sasaran.....	31
IV. Indikator Kinerja Utama.....	32
V. Rencana Kerja Tahunan.....	34
VI. Strategi.....	37
VII. Arah Kebijakan.....	40
VIII. Program.....	40
IX. Perjanjian Kinerja.....	41
X. Rencana Anggaran Tahun 2023.....	41
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	59
I. Capaian Kinerja.....	59
II. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Tahun Sebelumnya.....	60
III. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.....	62
IV. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya.....	66
V. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis.....	67
VI. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	70

VII. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis.....	71
VIII. Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan Tahun Sebelumnya.....	75
BAB IV PENUTUP.....	95
I. Kesimpulan.....	95
II. Perbaikan Kedepan.....	96
LAMPIRAN.....	iii

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Pemetaan Permasalahan.....	5
Tabel 2. Daftar Aset tetap Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2023.....	12
Tabel 3. Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.....	33
Tabel 4. Tujuan/ Sasaran Strategis DPMPTSP Kab. Kutai Kartanegara 2021-2026.....	34
Tabel 5. IKU (Indikator Kinerja Utama) DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.....	36
Tabel 6. Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2023.....	37
Tabel 7. Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2023.....	41
Tabel 8. Strategi dan Arah Kebijakan.....	41
Tabel 9. Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2023.....	42
Tabel 10. Perjanjian Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2023.....	42
Tabel 11. Perjanjian Kinerja Tambahan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2023.....	46
Tabel 12. Perbandingan Perjanjian Kinerja Utama Tahun 2023 Dengan Data Awal Tahun 2022 dan Target Tahun 2023.....	47
Tabel 13. Program Kegiatan dan sub kegiatan beserta anggaran (APBD) Tahun 2023.....	60
Tabel 14. Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	61
Tabel 15. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 dan 2022.....	62
Tabel 16. Tindak Lanjut atas LHE Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.....	63
Tabel 17. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	67

Tabel 18.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya (Tahun 2022).....	67
Tabel 19.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis.....	71
Tabel 20.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	71
Tabel 21.	Indikator Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal dan Pengendalian Pelayanan Penanaman Modal.....	71
Tabel 22.	Indikator Program Pelayanan Penanaman Modal.....	74
Tabel 23.	Capaian Kinerja Program (Keberhasilan/ Kegagalan).....	74
Tabel 24.	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2023.....	76
Tabel 25.	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun Sebelumnya (2022).....	88

		Halaman
Gambar 1.	Keterkaitan Permasalahan utama dengan Permasalahan Pokok Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026.....	5
Gambar 2.	Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP.....	9
Gambar 3.	Struktur Organisasi DPMPTSP Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 76 Tahun 2021.....	10
Gambar 4.	Komposisi ASN Berdasarkan Golongan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2023.....	11
Gambar 5.	Komposisi Non- ASN Berdasarkan Tugas Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2023.....	12
Gambar 6.	Loket Layanan Terpadu Satu Pintu.....	19
Gambar 7.	Layanan Costumer Servis.....	19
Gambar 8.	Layanan POLRES DAN Layanan SAMSAT.....	20
Gambar 9.	Layanan Dinas Transmigrasi & Ketenagakerjaan, dan Layanan Imigrasi.....	20
Gambar 10.	Layanan Pajak, Layanan Pegadaian dan Layanan Kantor Pertanahan.....	21
Gambar 11.	Layanan BPJS Ketenagakerjaan, PDAM Tirta Mahakam dan Pengadilan Agama.....	22
Gambar 12.	Layanan Pengadilan Negeri, Layanan DISDUK CAPIL, Layanan Kantor Pos dan Kejaksaan Negeri.....	23
Gambar 13.	Layanan Perbankan (Bankaltimtarra dan BRI).....	25
Gambar 14.	Pojok Baca Digital.....	25
Gambar 15.	Ruang Bermain Anak.....	26
Gambar 16.	Ruang Laktasi.....	26
Gambar 17.	Layanan Pengaduan.....	27
Gambar 18.	Layanan Aksesibilitas.....	27
Gambar 19.	Alat cetak Mandiri.....	28
Gambar 20.	Ruang Tunggu.....	28
Gambar 21.	Ruang pernikahan/ Kantor Urusan Agama.....	29
Gambar 22.	Penerimaan Penghargaan 2023.....	68
Gambar 23.	Survey Masyarakat dan Jumlah Kunjungan 2023.....	69
Gambar 24.	Pendampingan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Kementerian Pemberdayaan dan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan capaian Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna terselenggaranya *good governance* di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XII/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan disusunnya Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diharapkan :

1. Memberikan Informasi Kinerja yang terukur kepada yang memberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan Perundang-Undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai Upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk meningkatkan kinerja;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didalam menjalankan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

II. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

III. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dengan program prioritas antara lain sebagai berikut:

- a. Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- b. Peningkatan Promosi Penanaman Modal;
- c. Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- d. Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal;
- e. Peningkatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- d. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

IV. Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan

Dalam perumusan perencanaan kebijakan pembangunan lima tahun mendatang, permasalahan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki urgensi vital dalam menyusun setiap tahapan kebijakan agar relevan dan mampu secara optimal mencapai visi pembangunan yang diharapkan. Permasalahan yang dirumuskan harus mampu menggambarkan setiap detil kondisi Kutai Kartanegara sehingga setiap kebijakan yang dirumuskan relevan dengan penyelesaian permasalahan pembangunan. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, diperoleh gambaran permasalahan utama pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yakni: ***“Belum Optimalnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Kutai Kartanegara”***. Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 6 (enam) pokok permasalahan sebagai berikut. (1.) Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik; (2.) Belum optimalnya pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia; (3.) Belum meratanya kualitas kesejahteraan masyarakat; (4.) Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah; (5.) Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah; dan (6.) Tingginya potensi penurunan kualitas lingkungan hidup. Ilustrasi keterkaitan antara permasalahan utama dengan permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar 1.
Keterkaitan Permasalahan utama dengan Permasalahan Pokok
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026



Daya Tarik investasi suatu daerah akan tinggi salah satunya jika terdapat kemudahan dalam pelayanan perizinan, dengan pelayanan perizinan yang efektif, efisien dan melayani maka akan terjadi percepatan Penanaman Modal pada Kabupaten Kutai Kartanegara.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dibutuhkan aparatur yang professional, standar prosedur yang jelas dan biaya pelayanan yang pasti. Menjawab tantangan untuk mencapai pelayanan perizinan yang efektif, efisien dan kepastian biaya, diperlukan kerja keras dan dukungan semua pihak. Dalam hal ini perlu adanya pembenahan kualitas dan motivasi aparatur pelaksanaan pelayanan tersebut.

Sebagai identifikasi awal terdapat beberapa permasalahan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta factor-factor yang mempengaruhinya, antara lain sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Iklim Investasi Penanaman Modal di Kutai Kartanegara.
2. Kurang Optimalnya Mutu Pelayanan Perizinan.

Tabel 1.
Pemetaan Permasalahan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya Iklim Investasi Penanaman Modal di Kutai Kartanegara	Belum Optimalnya Pengembangan Iklim Penanaman Modal	- Belum adanya Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. - Belum tersedianya Data dan Peta Potensi Investasi Menuju Sektor Hilir
		Kurang Optimalnya Promosi Penanaman Modal	Belum Efektifnya Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal
		Belum Optimalnya Pengendalian Penanaman Modal	Belum Optimalnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal
		Belum Optimalnya Pengelolaan Data dan Penggunaan Sistem Informasi dalam Penanaman Modal	Belum Optimalnya Pengolahan, Penyajian Data dan Informasi Perizinan dan Non-Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2	Kurang Optimalnya Mutu Pelayanan Perizinan	Belum efektifnya Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal	Belum Efektifnya Layanan Konsultasi dan Pengaduan Perizinan dan Non-Perizinan

Isu- isu Strategis

Perumusan isu strategis Kabupaten Kutai Kartanegara dalam perencanaan pembangunan daerah periode pembangunan 2021- 2026, dapat diselaraskan dengan arah kebijakan tahap IV RPJPD Kutai Kartanegara yang telah diinventarisasi setiap permasalahan yang relevan. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan dan tantangan pembangunan sebagaimana dijabarkan pada isu internasional, isu nasional, isu regional, maupun telaahan RTRW dan KLHS Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dapat diindikasikan bahwa isu strategis pada pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Kartanegara periode pembangunan 2021- 2026 dijabarkan sebagai berikut:

1. Implementasi Reformasi Birokrasi secara menyeluruh;
2. Peningkatan pemerataan kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Percepatan penanganan dan penanggulangan COVID-19 dan pemulihan dampaknya;
4. Pengembangan perekonomian berkelanjutan;
5. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN);
6. Pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar untuk penguatan wilayah;
7. Transformasi dan percepatan pembangunan desa dan kecamatan;
8. Penataan Ruang dan Sumber Daya Air (Air Baku dan Irigasi).

Isu-isu strategis menjadi salah satu dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun kedepan. Isu strategis tersebut merupakan wujud dari antisipasi terhadap perubahan strategis, lingkungan global yang kita hadapi bersama. Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas Pelaksanaan urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu isu- isu strategis yang harus mendapat perhatian antara lain:

1. Peningkatan kinerja kelembagaan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal;
3. Peningkatan konsistensi pelayanan penanaman modal;
4. Penyajian data dan informasi penanaman modal dan perizinan yang terintegrasi secara elektronik;
5. Peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

V. Uraian Singkat Organisasi

Dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, bersama seluruh unsur pendukung pemerintahan lainnya maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara akan siap memberikan pelayanan prima. Melalui berbagai arah kebijakan, strategi, program hingga implementasinya pada kegiatan setiap tahun diharapkan akan tercipta iklim investasi yang lebih menarik dan kondusif, terwujudnya iklim investasi yang menarik dan kondusif di Kabupaten Kutai Kartanegara memperkuat daya saing dengan daerah lain dan daya tarik tersendiri bagi investor sehingga Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi salah satu daerah tujuan utama investasi di Kalimantan Timur.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan

pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan wajib di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 76 Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi pokok:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Pelaksanaan fungsi lain di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. Penyusunan laporan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Gambar 2.
Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP



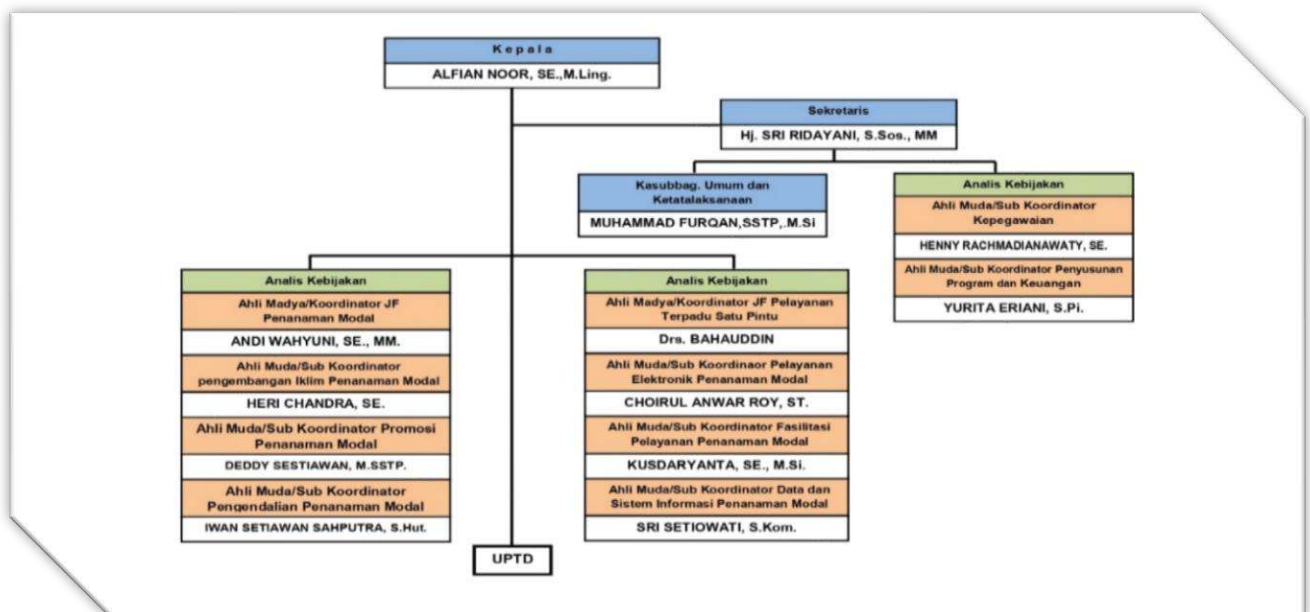
Sumber : Umum dan Tatalaksana, DPMPTSP 2023

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas:

- a. Kepala
- b. Sekretaris, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Tatalaksana;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional selaku Sub Koordinator Kepegawaian dijabat Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional selaku Sub Koordinator Penyusunan Program dan Keuangan dijabat oleh Perencana Ahli Muda.
- c. Koordinator Jabatan Fungsional Penanaman Modal dijabat oleh Jabatan Fungsional Ahli Madya, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional selaku Sub Koordinator Pengendalian Penanaman Modal dijabat oleh Jabatan Fungsional Ahli Muda;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional selaku Sub Koordinator Promosi Penanaman Modal dijabat oleh Jabatan Fungsional Ahli Muda; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional selaku Sub Koordinator Pengembangan Iklim Penanaman Modal dijabat oleh Jabatan Fungsional Ahli Muda.

- d. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu dijabat oleh Pejabat Fungsional Ahli Madya, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional selaku Sub Koordinator Pelayanan Elektronik Penanaman Modal dijabat oleh Jabatan Fungsional Ahli Muda;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional selaku Sub Koordinator Fasilitas Pelayanan Penanaman Modal dijabat oleh Jabatan Fungsional Ahli Muda;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional selaku Sub Koordinator Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dijabat oleh Jabatan Fungsional Ahli Muda.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sekelompok Jabatan Fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Unit pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Gambar 3.
Struktur Organisasi DPMPTSP
Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara
Nomor 76 Tahun 2021



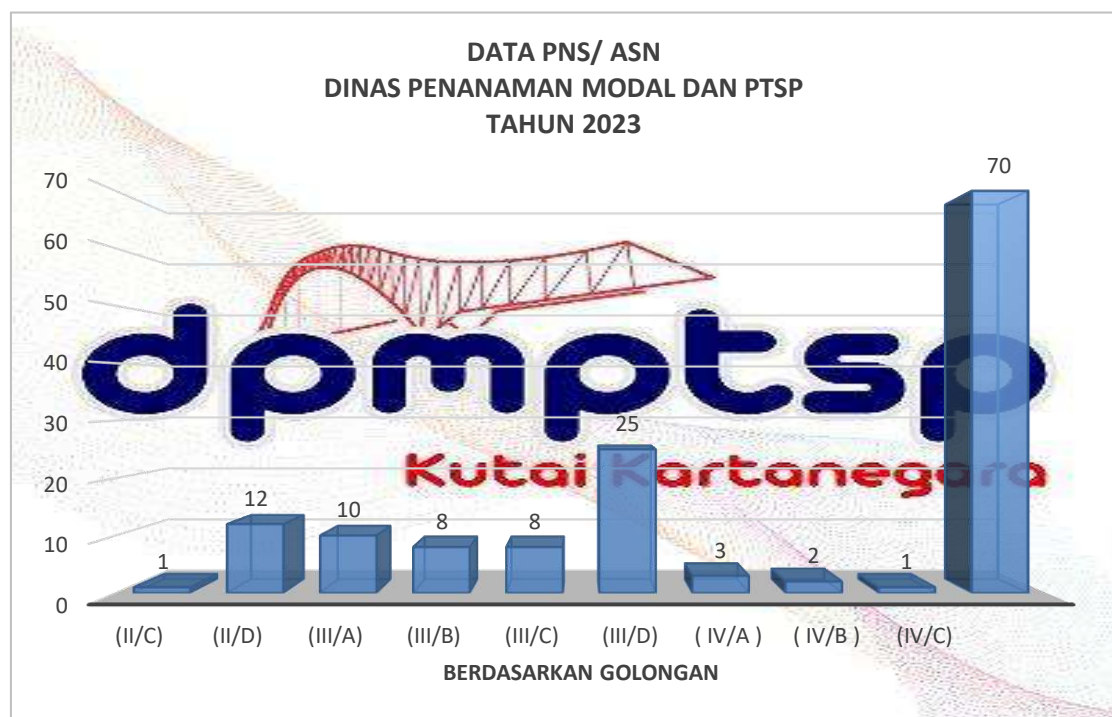
Sumber : Umum dan Tatalaksana, DPMPTSP 2023

VI. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya sumber daya aparatur yang merupakan motor penggerak jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut terdapat sejumlah aparatur maupun tenaga pendukung di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara. Keseluruhan SDM memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda.

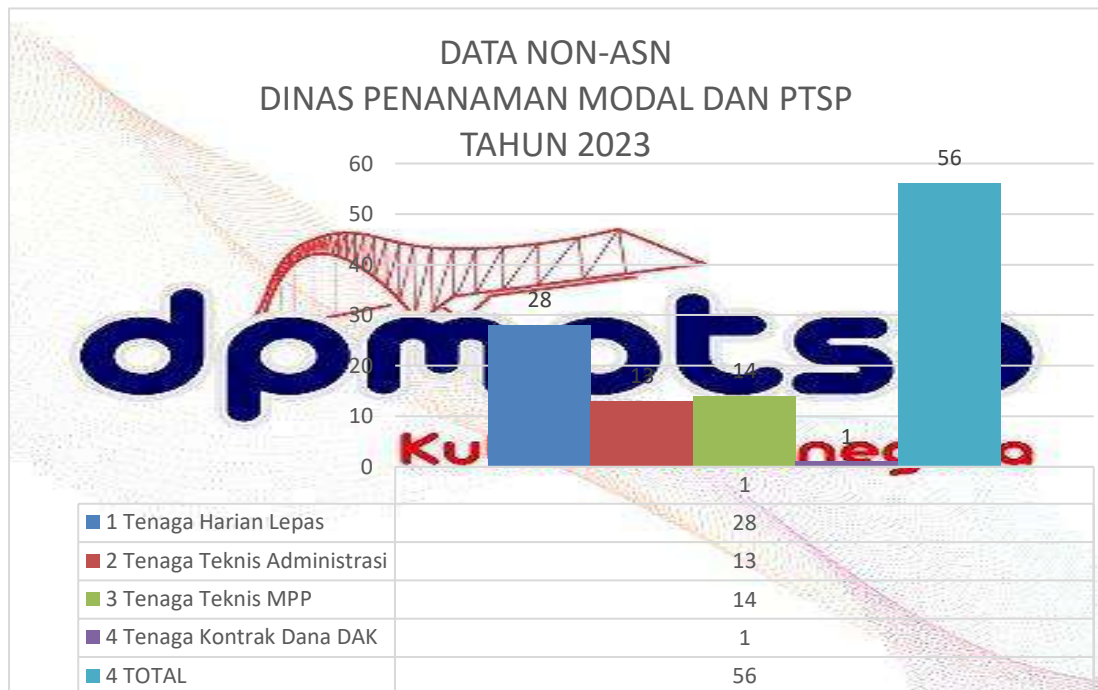
Adapun jumlah pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 sebanyak 70 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan sebanyak 56 Orang berstatus Non-PNS. Adapun komposisi mengenai Aparatur Sipil Negara pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP disajikan pada gambar-gambar berikut ini:

Gambar 4.
Komposisi ASN Berdasarkan Golongan
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Tahun 2023



Sumber : Sub Koordinator Kepegawaian, DPMPTSP 2023

Gambar 5.
Komposisi Non- ASN Berdasarkan Tugas
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Tahun 2023



Sumber : Sub Koordinator Kepegawaian, DPMPTSP 2023

VII. Sarana Dan Prasarana

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjalankan tugas dan fungsi didukung oleh sarana dan prasarana. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.
Daftar Aset tetap
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Tahun 2023

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	1.237	17.824.876.324,00
	ALAT BESAR	2	18.750.000,00
	- alat pengangkat lainnya (dst)	1	1.250.000,00
	- electric generating set lainnya (dst)	1	17.500.000,00
	KOMPUTER	447	8.144.194.520,00
	- Mainframe (Komputer Jaringan)	47	592.735.679,00

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
	- Local Area Network (LAN)	11	115.830.000,00
	- Komputer Jaringan lainnya	1	8.250.000,00
	- P.C Unit	63	1.800.555.795,00
	- Lap Top	48	1.130.689.415,00
	- Note Book	11	257.570.400,00
	- Tablet PC	2	26.399.150,00
	- Hard Disk	15	251.073.785,00
	- Card Reader (Peralatan Mini Komputer)	1	5.772.000,00
	- Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	27.236.000,00
	- CPU (Peralatan Personal Komputer)	4	122.222.000,00
	- Monitor	39	1.430.120.700,00
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	154	729.376.376,00
	- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	15	170.933.900,00
	- Capture Card	2	4.928.000,00
	- Peralatan Personal Komputer lainnya	1	35.039.000,00
	- Server	4	1.268.915.440,00
	- Router	1	2.113.100,00
	- Hub	8	9.590.880,00
	- Switch	1	36.110.000,00
	- Peralatan Jaringan lainnya	15	68.200.000,00
	- Peralatan Komputer lainnya	3	50.532.900,00
	ALAT EKSPLORASI	1	32.340.000,00
	- alat eksplorasi topografi lainnya lainnya (dst)	1	32.340.000,00
	ALAT ANGKUTAN	11	2.036.279.450,00
	- Station Wagon	5	1.221.679.450,00
	- Multi Purpose Vehicle (MPV)	1	450.100.000,00
	- Sepeda Motor	2	34.610.000,00
	- Kapal Visual Mini	2	95.920.000,00
	- kapal terbang lainnya (dst)	1	233.970.000,00
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	32	326.150.000,00
	- Battery Charge	1	1.595.000,00
	- Reciver	1	15.000.000,00
	- Global Positioning System	5	185.405.000,00
	- Scanner (Universal Tester)	25	124.150.000,00
	ALAT PERTANIAN	1	4.028.000,00

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
	- Lemari Penyimpan	1	4.028.000,00
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	643	6.463.894.714,00
	- Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	3	9.600.000,00
	- Mesin Fotocopy Folio	2	14.660.000,00
	- Lemari Besi/Metal	6	52.073.000,00
	- Lemari Kayu	32	497.580.000,00
	- Filing Cabinet Besi	4	10.000.000,00
	- Brandkas	3	57.903.500,00
	- Kontainer	1	94.787.000,00
	- Lemari Kaca	3	13.125.000,00
	- CCTV - Camera Control Television System	12	22.420.000,00
	- White Board	1	33.243.000,00
	- Alat Penghancur Kertas	7	21.507.000,00
	- Mesin Absensi	4	68.056.000,00
	- Display	1	10.000.000,00
	- Mesin Laminating	1	120.157.500,00
	- Alat Sidik Jari	2	97.884.500,00
	- Papan Nama Instansi	1	1.500.000,00
	- Alat Kantor Lainnya	17	84.243.796,00
	- Meja Kerja Kayu	14	814.698.000,00
	- Meja Rapat	1	35.959.000,00
	- Meja Resepsionis	1	121.256.250,00
	- Meja Tambahan	31	261.751.879,00
	- Meja Panjang	14	78.768.200,00
	- Kursi Tamu	8	21.200.000,00
	- Partisi	13	23.712.299,00
	- Sofa	5	55.232.000,00
	- Lemari Es	6	13.365.000,00
	- A.C. Window	3	16.500.000,00
	- A.C. Split	30	606.438.700,00
	- Kipas Angin	3	11.907.900,00
	- Kompor Gas (Alat Dapur)	1	1.750.000,00
	- Rice Warmer	1	26.875.000,00
	- Tabung Gas	2	2.000.000,00
	- Mixer	1	7.700.000,00

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
	- Televisi	16	397.890.500,00
	- Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	10.000.000,00
	- Loudspeaker	2	8.200.000,00
	- Sound System	1	19.088.000,00
	- Wireless	1	5.430.000,00
	- Microphone	1	3.265.900,00
	- Microphone Table Stand	8	13.332.000,00
	- Camera Video	1	3.926.000,00
	- Camera film	5	86.699.900,00
	- Lambang Garuda Pancasila	2	3.000.000,00
	- Tiang Bendera	1	2.000.000,00
	- Dispenser	17	235.749.000,00
	- Handy Cam	2	25.818.000,00
	- Alat Pemanas Ruangan	2	2.592.000,00
	- Lampu	4	13.506.900,00
	- Alat Pemadam Kebakaran lainnya	7	12.210.550,00
	- Meja Kerja Pejabat Eselon II	3	115.251.000,00
	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	8	137.843.200,00
	- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	10	172.304.000,00
	- Meja Kerja Pejabat Eselon V	1	11.845.250,00
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	36	182.457.500,00
	- Meja Kerja Pejabat lain-lain	17	201.369.250,00
	- Meja Tamu Biasa	1	1.215.014,00
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	3	25.542.333,00
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	7.736.333,00
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon V	1	7.736.333,00
	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	77	296.048.426,00
	- Kursi Kerja Pejabat lainnya	74	444.822.664,00
	- Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	4	30.945.332,00
	- Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	41	317.189.653,00
	- Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2	15.472.666,00
	- Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V	2	15.472.666,00
	- Kursi Hadap Depan Meja Kerja lainnya	20	84.860.000,00
	- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	37	245.219.820,00

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	60	394.854.890,00
	- Audio Mixing Console	2	13.620.000,00
	- Audio Mixing Portable	1	10.516.000,00
	- Audio Mixing Stationer	1	1.815.000,00
	- Audio Phone In	4	4.312.000,00
	- Microphone/Wireless MIC	6	20.551.800,00
	- Uninterruptible Power Supply (UPS)	19	86.534.500,00
	- Digital Audio Taperecorder	2	4.530.280,00
	- Cable	4	5.720.000,00
	- peralatan studio audio lainnya (dst)	2	4.488.000,00
	- Camera Electronic	4	86.308.240,00
	- Video Monitor	2	9.300.000,00
	- Video Switcher	1	21.340.000,00
	- Tripod Camera	1	1.089.000,00
	- Layar Film/Projector	3	34.985.000,00
	- Camera Digital	2	45.370.070,00
	- Lampu Blitz Kamera	1	1.925.000,00
	- Video Conference	1	14.300.000,00
	- LCD Monitor	1	5.050.000,00
	- Facsimile	1	2.000.000,00
	- Audio Monitor	2	21.100.000,00
	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	2	6.480.000,00
	- Kursi Dorong	1	3.985.000,00
	- Alat Kedokteran umum lainnya	1	2.495.000,00
	ALAT LABORATORIUM	34	386.684.750,00
	- Stabilizer	1	4.364.800,00
	- Meja Kerja	32	379.048.000,00
	- Portable Noise Monitoring	1	3.271.950,00
	ALAT PERSENJATAAN	4	11.220.000,00
	- Lemari Camera	1	6.270.000,00
	- Bateray Pack Camera	2	3.300.000,00
	- Tripot Background	1	1.650.000,00
2	EKS BPMPD	250	2.381.401.158,75
	KOMPUTER	69	708.328.488,77
	- P.C Unit	19	226.933.610,26

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
	- Lap Top	16	261.173.298,77
	- Note Book	5	108.955.000,00
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	25	90.322.579,74
	- External	3	13.475.000,00
	- Peralatan Personal Komputer lainnya	1	7.469.000,00
	ALAT ANGKUTAN	17	738.619.000,00
	- Station Wagon	1	129.492.000,00
	- kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1	192.000.000,00
	- Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2	233.200.000,00
	- Sepeda Motor	13	183.927.000,00
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	2	53.900.000,00
	- Global Positioning System	1	8.140.000,00
	- alat ukur lain-lain lainnya (dst)	1	45.760.000,00
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	148	781.299.469,98
	- Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	15	44.715.000,00
	- Mesin Penghitung Uang	1	5.775.000,00
	- Lemari Besi/Metal	6	20.460.000,00
	- Filing Cabinet Besi	8	26.950.000,00
	- Lemari Makan	1	5.005.000,00
	- Mesin Absensi	2	12.045.000,00
	- Display	3	72.314.000,00
	- Meja Rapat	1	1.370.800,00
	- Meja 1/2 Biro	3	15.773.670,00
	- Kursi Tamu	11	34.865.000,00
	- Sofa	2	50.050.000,00
	- Jam Mekanis	1	10.775.000,00
	- Mesin Pemotong Rumput	1	3.000.000,00
	- Lemari Es	4	10.360.500,00
	- A.C. Split	8	84.317.999,98
	- Televisi	5	112.205.000,00
	- Sound System	1	9.350.000,00
	- Wireless	1	14.630.000,00
	- Mic Conference	1	56.540.000,00
	- Tangga Aluminium	3	6.190.000,00
	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	3	7.300.000,00

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	22	42.471.000,00
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	2.310.000,00
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	6.160.000,00
	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	16	16.544.000,00
	- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	24	109.822.500,00
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	4	46.365.000,00
	- peralatan studio audio lainnya (dst)	1	12.155.000,00
	- Camera Electronic	1	12.100.000,00
	- Slide Projector	1	12.430.000,00
	- Lensa Kamera	1	9.680.000,00
	ALAT LABORATORIUM	4	44.494.000,00
	- Generator Set (Lab Scale)	1	15.014.000,00
	- Layar	1	14.850.000,00
	- Vacuum Drying Oven	2	14.630.000,00
	ALAT PERSENJATAAN	6	8.395.200,00
	- Dispencer	6	8.395.200,00
	TOTAL	1.487	20.206.277.482,75

Sumber : Sub Koordinator Penyusunan Program dan Keuangan DPMPSTP, 2023

Kesemua Peralatan tersebut digunakan untuk mendukung Pelayanan Perizinan baik itu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maupun Di Mal Pelayanan Publik/ MPP yang mana pada MPP memiliki 28 Entitas Layanan yang pada saat ini secara Kuantitatif sudah sebanding dengan beban Pekerjaan. Namun secara Kualitas ada beberapa sarana dan prasarana yang masih butuh perbaikan dan peremajaan, seperti Perkebangan Teknologi dan tuntutan pelayanan prima, Adapun sarana dan prasarana yang meunjang pelayanan tersebut yaitu :

1. Loker Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara didesain dengan ruang pelayanan yang digunakan untuk Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Ruang pelayanan berada di ruangan Mall Pelayanan Publik (MPP), yang didukung dengan fasilitas lengkap yang memadai, proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang adil,

transparan dan akuntabel, lantai yang selalu terlihat bersih, hawa ruangan yang terasa sejuk dan ruangan tertata rapi.

Gambar 6.
Loket Layanan Terpadu Satu Pintu



2. Layanan Costumer Servis

Di loket Costumer servis, petugas siap memberikan berbagai informasi dan pelayanan yang diinginkan oleh pemohon terkait permohonan perizinan dan non perizinan serta berbagai pelayanan lain yang tersedia di Mall Pelayanan Publik dengan penuh keramahan, berpakaian seragam yang berbeda dengan pegawai Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada umumnya, menghilangkan kesan birokrasi dalam proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Gambar 7.
Layanan Costumer Servis



3. Prasarana Layanan Pendukung

Di Mall Pelayanan Publik tersedia beberapa prasarana layanan pendukung perizinan yang diharapkan mampu membantu para masyarakat (pemohon) dalam mengurus perizinan dan nonperizinan.

Gambar 8.
Layanan POLRES DAN Layanan SAMSAT



Gambar 9.
Layanan Dinas Transmigrasi & Ketenagakerjaan, dan Layanan Imigrasi



Gambar 10.
Layanan Pajak, Layanan Pegadaian dan Layanan Kantor Pertanahan



Gambar 11.
Layanan BPJS Ketenagakerjaan, PDAM Tirta Mahakam
dan Pengadilan Agama



Gambar 12.
Layanan Pengadilan Negeri, Layanan DISDUK CAPIL,
Layanan Kantor Pos dan Kejaksaan Negeri





4. Prasarana pendukung lainnya seperti Bankaltimtara, Bank Rakyat Indonesia. Dalam dalam satu gedung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara memperkuat konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*one stop service*) yang memudahkan pemohon dalam pengurusan perizinan dari pengajuan permohonan, pembayaran retribusi izin sampai kegiatan investasi perbankan lain sehingga dapat menghemat waktu dan biaya.

Gambar 13.
Layanan Perbankan (Bankaltimtara dan BRI)



5. Perpustakaan/ Pojok Baca

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kutai Kartanegara menyediakan perpustakaan mini, yang dapat dimanfaatkan oleh pegawai, pemohon izin dan tamu untuk membaca berbagai macam buku yang tersedia dalam bentuk fisik maupun digital.

Gambar 14.
Pojok Baca Digital



6. Ruang Bermain Anak

Ruang bermain anak disediakan untuk pemohon yang membawa putra putri kecilnya untuk mengurus izin agar anak tidak merasa bosan.

Gambar 15.
Ruang Bermain Anak



7. Ruang Laktasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga menyediakan Ruang Laktasi yang disediakan untuk pegawai maupun pemohon yang ingin memberikan ASI pada bayinya.

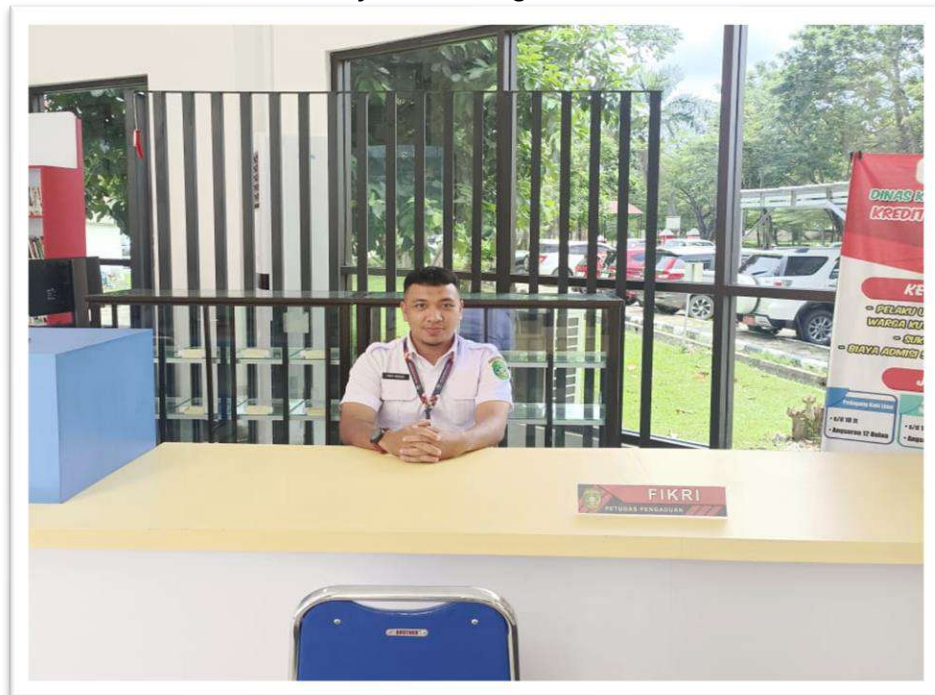
Gambar 16.
Ruang Laktasi



8. Layanan Pengaduan

Layanan Pengaduan merupakan salah satu sarana atau fasilitas pengaduan yang dapat digunakan oleh pemohon izin jika ada keluhan maupun pengaduan terkait pelayanan perizinan dan non perizinan.

Gambar 17.
Layanan Pengaduan



9. Aksesibilitas

Aksesibilitas disediakan untuk memudahkan penyandang disabilitas, ibu hamil dan lansia yang menggunakan kursi roda dan tongkat.

Gambar 18.
Layanan Aksesibilitas



10. Alat Cetak Mandiri

Alat cetak mandiri dapat digunakan untuk membantu pemohon dalam memproses.

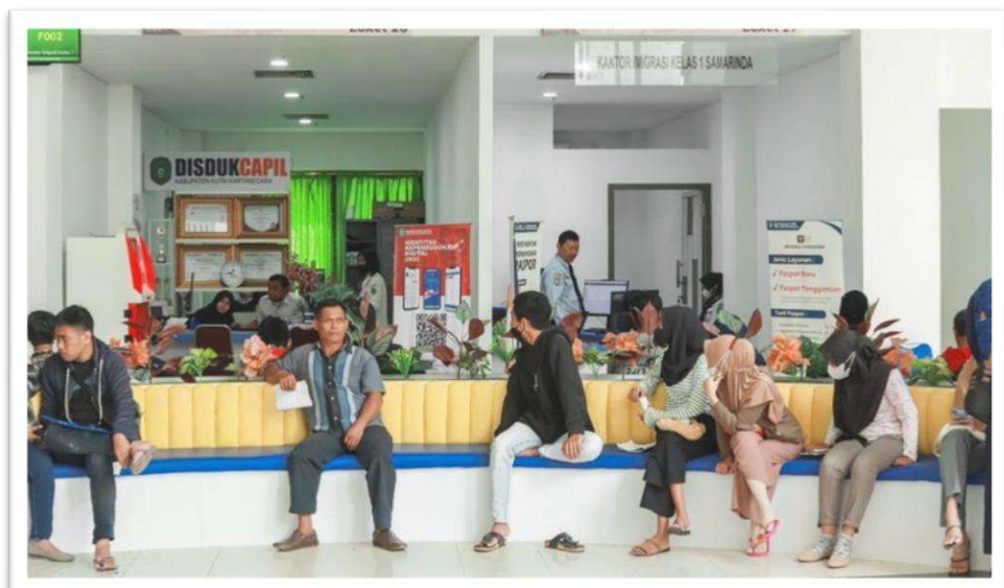
Gambar 19.
Alat cetak Mandiri



11. Monitor Loker Antrian

Ruang Tunggu Antrian terdapat di beberapa titik di lantai satu Mall Pelayanan Publik. Ruang Tunggu Antrian digunakan untuk memfasilitasi pemohon agar dapat duduk dengan nyaman ketika menunggu nomor antriannya dipanggil.

Gambar 20.
Ruang Tunggu





12. Layanan Pernikahan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara menyediakan fasilitas ruang akad nikah. Ruang akad nikah dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang menginginkan akad nikah diselenggarakan di Mal Pelayanan Publik.

Gambar 21.
Ruang pernikahan



VIII. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas kondisi umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas Visi Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasara, IKU, RKT, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan dokumen ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023 serta Rencana Anggaran Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja dan Realisasi, Menjelaskan analisis pencapaian kinerja dan Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara, dikaitkan dengan pertanggung jawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2023 serta Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dan tahun sebelumnya (2021 dan 2022).

Bab IV Penutup

Menjelaskan simpulan umum atas Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 dan langkah dimasa akan datang yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

I. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah, yang tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021–2026 dan diturunkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026. Perumusan atas Visi dan Misi sebagaimana tersebut di atas kemudian ditindak lanjuti guna dikembangkan secara lebih spesifik ke dalam tujuan dan sasaran agar dapat lebih mengarahkan arah kerja sebagai panduan dalam mencapai apa yang telah ditetapkan ke dalam Tujuan dan Sasaran Strategis pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang dalam tahun ke depan.

II. Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran

menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

“(Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia)”

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;

2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;

3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah;

5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

III. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Misi ke- 1 (Satu) yaitu **“Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani”** dan misi ke tiga **“Memperkuat Pembangunan Ekonomi berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif”**, dengan program Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA) dan Program Kukar Bebaya. Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan

sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut:

Tabel 3.
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi: “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”					
NO.	Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
		Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
1	Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman moda	Indek Kepuasan Masyarakat (%)
2	Memperkuat Pembangunan Ekonomi berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatkan Investasi daerah melalui efisiensi pelayanan investasi daerah	Nilai Realisasi Investasi	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMA/ PMDN)	Nilai Realisasi Investasi (PMA/ PMDN) Triliun Rupiah

Sumber : RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara

Hubungan dari Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara



Tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 lebih rinci disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.
Tujuan/ Sasaran Strategis DPMPTSP Kab. Kutai Kartanegara 2021-2026

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target tahunan				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi (PMA/PMDN)	Triliun Rupiah	3,88	3,95	4,02	4,09	4,16
2	Meningkatkan Keualitas Pelayanan Penanaman Modal	Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai	87,12	87,75	88,25	89,52	91,73

Sumber data : Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP

IV. Indikator Kinerja Utama

Setiap Sasaran Strategis Perangkat Daerah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. Berdasarkan pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Tujuan dari Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

- Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Tujuan dari Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu: Tingkat Pertumbuhan Investasi. Dan dari hasil pemantauan dan evaluasi capaian IKK LPPD Tahun 2022 maka Sesuai dengan surat nomor : B-1927/TAPEM/ OTDA/ 100/ 08/ 2023 tanggal 07 Agustus 2023 terjadi perubahan atas target kinerja Tujuan, hal ini dikarenakan Target Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN meningkat pesat dikarenakan target Investasi yang kami masukan didalam RPJMD adalah target kami dimasa *Pandemi covid 19*

dimana situasi ekonomi yang melambat dan tidak adanya kepastian dari keadaan tersebut, Dan ketika *Pandemi Covid 19* berakhir kami menentukan target baru seiring meningkatnya minat investasi di kutai kartanegara yang mula-mula target kami 1,73 persen menjadi 30,47 persen dimana target tersebut kami ambil dari persentase pertumbuhan investasi PMA dan PMDN dari tahun 2019 s.d tahun 2022 hal ini dapat kami simpulkan setelah kami melakukan kajian terhadap data kinerja DPMPTSP tahun 2021. Berdasarkan hal tersebut diatas, Berikut disajikan IKU Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2021-2026:

Tabel 5.
IKU (Indikator Kinerja Utama) DPMPSTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target tahunan Awal					Target tahunan Baru				
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi (PMA/PMDN)	Triliun Rupiah	3,88	3,88	3,95	4,02	4,09	7 T	7,2 T	7,35 T	7,4 T	7,45 T
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai	87,12	87,12	87,75	88,25	89,52	87,12	87,12	87,75	88,25	89,52

Sumber : IKU DPMPSTSP 2021-2026

V. Rencana Kerja Tahunan

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran/ operasionalisasi dari Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, dan akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara melalui berbagai program dan kegiatan tahunan. Adapun Program Kegiatan dan sub kegiatan yang telah sesuai dengan nomenklatur baru sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 090 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.
Rencana Kerja Tahunan
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	VOLUME	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1 Dokumen	
		Koordinasi Dan Penyusunan DPA - SKPD	1 Dokumen	
		Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	1 Dokumen	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/Bulan	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5 Dokumen	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	VOLUME	KETERANGAN
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 dokumen	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket /127 Aparatur	
		Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	100 Dokumen	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15 Orang	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	50 Orang	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 paket	
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	2 paket	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	1 Dokumen	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500 Dokumen	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24 Unit	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2500 Laporan	
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 Laporan	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	VOLUME	KETERANGAN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	48 Unit	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60 Unit	
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 Dokumen	
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
3	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7 Investor	
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	1 Dokumen	
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	500 Izin	
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	500 Pelaku Usaha	
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	300 Kegiatan Usaha	
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	100 Orang	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	12 Kegiatan Usaha	
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Dearah Kabupaten/Kota	370 pelaku usaha/Kegiatan	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	100 Kegiatan Usaha	

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	VOLUME	KETERANGAN
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	100 Pelaku Usaha	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	100 Kegiatan Usaha	
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15 Jumlah Aplikasi ; 127 Dokumen	
		Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	127 Dokumen	

VI. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk periode 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Reformulasi desain investasi menuju hilirsasi SDA terutama Blue Investment dan Green Investment;
2. Digitalisasi dan Penggunaan AI (*artificial intelegent*) pelayanan perizinan.

VII. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 - 2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7.
Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1	Reformulasi desain investasi menuju hilirisasi SDA	- Pemberian insentif pada investasi yang mentransformasikan sektor hulu menuju sektor hilir; - Pengendalian investasi penanaman modal menuju hilirisasi SDA.
2	Digitalisasi dan Penggunaan AI (<i>artificial intelegent</i>) pelayanan perizinan	Penyediaan layanan publik yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi.

VIII. Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2023, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 8.
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2023

No.	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
1	Meningkatnya daya saing daerah	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)	Nilai Realisasi Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
				Jumlah Investor (PMDN/ PMA)	Program Promosi Penanaman Modal
				Kenaikan/Penurunan PMA/PMDN	Program Pengendalian Penanaman Modal
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Pelayanan Penanaman Modal
				Jumlah Aplikasi	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

IX. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/ Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tabel 9.
Perjanjian Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Kutai Kartanegara
Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)	Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)	Triliun Rupiah	3,95	Hasil Realisasi Investasi (PMDN/ PMA) pada Aplikasi NSWI
2	Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	87,12	Hasil Survey IKM dikalikan dengan 100 (Seratus)

Selain perjanjian kinerja yang berdasarkan dari dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara, terdapat perjanjian kinerja tambahan yang merupakan amanat dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada seluruh Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut:

Tabel 10.
Perjanjian Kinerja Tambahan
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	80,00	Hasil Evaluasi Sakip
2	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat pada tahun berjalan wajib	Persen	100	Jumlah lama hari tiindaklanjuti hasil temuan / paling lambat 60 hari kerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
	Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah	ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja			dikalikan dengan 100 (Seratus)
3	Melaksanakan dan melaporkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran	Persen	100	Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola dibagi jumlah Barang Milik Daerah dalam penelusuran dikalikan dengan 100 (Seratus)
4	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100	Jumlah paket pengadaan yang terinput di dalam SIRUP dibagi dengan jumlah seluruh paket pengadaan yang harus diinput dikalikan dengan 100 (Seratus)
5	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100	Jumlah ASN yang melaporkan LHKPN per 31 Maret 2021 dibagi dengan Jumlah seluruh ASN yang wajib melaporkan LHKPN per 31 Maret 2021 dikalikan dengan 100 (Seratus)
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100	Jumlah ASN yang melaporkan LHKASN per 31 Maret 2021 dibagi dengan Jumlah seluruh ASN yang wajib melaporkan LHKASN per 31 Maret 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
					dikalikan dengan 100 (Seratus)
6	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70	Hasil Evaluasi / Audit Kearsipan dari Tim
7	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Kerisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100	Jumlah Data yang tersedia/ terisi pada aplikasi Satu Data Kukar dan E-Pantau dikalikan dengan 100 (Seratus)
8	Membuat inovasi dan/ atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	Jumlah Inovasi dalam Bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan Fungsi OPD
9	Terrealisasinya Output Kegiatan tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	Jumlah Capaian Output Kegiatan dikalikan dengan 100 (Seratus)
10	Melaksanakan Percepatan Realisasi Kegoatan Fisik dan Keuangan	persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100	Jumlah Capaian Realisasi fisik Kegiatan dikalikan dengan 100 (Seratus)
		persentase realisasi keuangan	Persen	100	Jumlah Capaian Output Realisasi Keuangan dikalikan dengan 100 (Seratus)
11	Melaksanakan Manajemen Risiko terhadap program kegiatan di Perangkat Daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Risiko dan Laporan Penegendalian Manajemen Risiko Maksimal 10 Januari	Laporan	2	Jumlah Laporan Penyusunan Manajemen Risiko dan Jumlah Laporan Pengendalian Manajemen Risiko yang selesai maksimal

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
					tanggal 10 Januari
12	Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1	Hasil Reviu Indikator Kerja Utama yang sesuai dengan data terkini
13	Melaksanakan Tata Kelola <i>Core Values</i> ASN "BerAKHLAK"	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Internalisasi, Penetapan leader, Tim Budaya Kerja	Kegiatan	4	Hasil Kegiatan Sosialisasi, Internalisasi, Penetapan leader, Tim Budaya Kerja
14	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP Per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi	Persen	100	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi minimal 20 JP Per Tahun dikalikan dengan 100 (Seratus)
15	Melaksanakan Monitoring <i>Center For Prevention</i> KPK	Persentase Pelaksanaan dan Pemenuhan Monitoring <i>Center For Prevention</i> KPK	Persen	100	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Monitoring <i>Center For Prevention</i> KPK dikalikan dengan 100 (Seratu)
16	Mewujudkan kawasan Tanpa Asap Rokok di Knatoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100	Hasil Survey Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR)
17	Pemenuhan Target Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan	Rupiah	2.444.165.868,-	Jumlah Pendapatan yang diterima selama 1 Tahun

Tabel 11.
Perbandingan Perjanjian Kinerja Utama Tahun 2023
Dengan Data Awal Tahun 2022 dan Target Tahun 2023

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	DATA AWAL (2022)	TARGET (2023)	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)	Triliun Rupiah	7 T	7,2 T	7,45 T
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	87,12	87,12	89,52

Sedangkan untuk perjanjian kinerja tambahan tidak bisa dibandingkan dikarenakan banyaknya tambahan Indikator Kinerja Sasaran pada perjanjian kinerja tahun 2023 yang tidak ada pada perjanjian kinerja tahun sebelumnya (Tahun 2022).

X. Rencana Anggaran Tahun 2023

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah yang telah ditetapkan pada Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan, maka operasionalisasi atau pelaksanaan kinerja tahunan di tuangkan dalam Rencana kerja Tahun 2023 dan Dokumen pelaksanaan Anggaran. Pada Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Kepmendagri 050- 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka RENJA tahun 2023 sudah mengacu pada KEPMEN tersebut. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan anggaran murni sebesar Rp.19.987.197.718 melalui mekanisme perubahan APBD tahun 2023 menjadi Rp.26.734.438.040,-

Tabel 12.
Program Kegiatan dan sub kegiatan beserta anggaran (APBD) Tahun 2023

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran	
					Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	10
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)		14.651.197.718	15.476.798.274
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran & Evaluasi Kinerja	11 Dokumen	418.995.000	732.274.612
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	1 Dokumen	198.995.000	198.995.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD		25.000.000	24.000.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahann RKA - SKPD	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen RKA Perubahan - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000	21.000.000
4	Koordinasi Dan Penyusunan DPA - SKPD	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000	20.000.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran	
					Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	10
5	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000	20.000.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD dan lapaoran hasil koordinasi penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 laporan	135.000.000	448.279.612
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Cakupan Administrasi Keuangan	100%	10.272.759.897	8.803.041.195
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah orang yg menerima gaji dan tunjangan ASN	12 Orang/Bulan	9.862.759.897	8.443.928.807
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD	1 Laporan	65.000.000	94.377.788

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran	
					Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	10
3	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lnjut Pemeriksaan	5 Dokumen	30.000.000	18.959.800
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semester SKPD	12 Laporan	285.000.000	233.759.800
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Laporan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	30.000.000	12.015.000
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Cakupan Administrasi BMD	3 dokumen	54.999.000	136.488.500
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 Dokumen	14.999.000	14.999.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran	
					Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	10
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	2 Laporan	40.000.000	121.489.500
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Cakupan Administrasi Kepegawaian	100%	364.500.000	736.340.000
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket /127 Aparatur	127.000.000	220.780.000
2	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Dukungan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	100 Dokumen	50.000.000	28.060.000
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	15 Orang	75.000.000	75.000.000
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	50 Orang	112.500.000	412.500.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran	
					Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	10
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Cakupan Administrasi Umum	100%	1.311.935.145	2.061.935.145
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	170.000.000	270.000.000
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	200.000.000	350.000.000
		Kab Kutai Kartanegara	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			
3	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah paket barang cetak dan pengadaan yang disediakan	2 paket	100.000.000	100.000.000
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	30.000.000	30.000.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran	
					Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	10
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	200 Laporan	761.935.145	1.261.935.145
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	500 Dokumen	50.000.000	50.000.000
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Cakupan Pengadaan BMD	100%	461.000.000	768.606.000
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	24 Unit	461.000.000	768.606.000
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Cakupan Penyediaan Jasa	100%	1.444.158.676	1.915.262.822
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2500 Laporan	20.000.000	10.450.500
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	185.000.000	135.000.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran	
					Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	10
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.089.678.676	1.560.332.322
4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Laporan	149.480.000	209.480.000
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Cakupan Pemeliharaan BMD	100%	322.850.000	322.850.000
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan pajaknya	48 Unit	263.620.000	263.620.000
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	60 Unit	59.230.000	59.230.000
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Jumlah Proyek (PMA/PMDN)	6 Proyek	1.000.000.000	1.000.000.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran	
					Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	10
J	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah peraturan Daerah / Provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	2 Dokumen	1.000.000.000	1.000.000.000
1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.000.000.000	1.000.000.000
3	Program Promosi Penanaman Modal		Jumlah Investor (PMA/PMDN)	7 Investor	950.000.000	1.295.494.400
K	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara			950.000.000	1.295.494.400
1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	750.000.000	995.494.400
2	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan kabupaten/Kota	1 Dokumen	200.000.000	300.000.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran	
					Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	10
4	Program Pelayanan Penanaman Modal		Jumlah Penerbitan Izin	500 Izin	1.250.000.000	1.250.000.000
L	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Indek Kepuasan Masyarakat	87,75	1.250.000.000	1.250.000.000
1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi Secara Elektronik	500 Pelaku Usaha	300.000.000	300.000.000
2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	300 Kegiatan Usaha	650.000.000	650.000.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran	
					Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	10
3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Orang Yang Memperoleh Layanan Konsultasi Dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Non Perizinan	100 Orang	200.000.000	200.000.000
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	12 Kegiatan Usaha	100.000.000	100.000.000
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Kenaikan /Penurunan Nilai Realisasi PMDN	370 pelaku usaha/ Kegiatan	1.436.000.000	1.681.700.000
M	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Dearah Kabupaten/ Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pengendalian PMA / PMDN	300 Pelaku usaha/ Kegiatan Usaha	1.436.000.000	1.681.700.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran	
					Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	10
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	100 Kegiatan Usaha	350.000.000	350.000.000
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	100 Pelaku Usaha	540.018.800	935.718.800
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan	100 Kegiatan Usaha	545.981.200	395.981.200
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Jumlah Aplikasi	Aplikasi	700.000.000	6.030.445.366
N	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Pengembangan dan Maintenance Aplikasi	15 Jumlah Aplikasi ; 127 Dokumen	700.000.000	6.030.445.366

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran	
					Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	10
1	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji Dan Dimanfaatkan	127 Dokumen	700.000.000	6.030.445.366
Jumlah					19.987.197.718	26.734.438.040

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

I. Capaian Kinerja

Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/ IX/ 6/ B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 13.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai	Kriteria Penilaian
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

II. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun sebelumnya

Hasil evaluasi implementasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 yang merupakan periode akhir, dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 14.
Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Tahun 2021 dan 2022

No	Komponen Yang di Nilai	Bobot	Nilai 2021	Nilai 2022	Keterangan
1.	Perencanaan Kinerja	30%	0,00	29,10	Meningkat
2.	Pengukuran Kinerja	25%	0,00	29,10	Meningkat
3.	Pelaporan Kinerja	15%	0,00	13,20	Meningkat
4.	Evaluasi Kinerja	10%	0,00	23,50	Meningkat
5.	Capaian Kinerja	20%	0,00	-	Meningkat
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	0,00	94,90	Meningkat
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		-	AA	Meningkat
	Interpretasi		-	Sangat Memuaskan	

Sumber : LHE SAKIP DPMPTSP, 2022

Hasil evaluasi sebagaimana tersebut diatas pada tahun 2021 tidak adanya penilaian sedangkan pada tahun 2022 dilakukan penilaian sebanyak 4 (empat) komponen, adapun penilaian tahun 2022 mengindikasikan adanya upaya perbaikan dan/ atau tindakan korektif secara signifikan, baik tindakan korektif yang didasarkan pada rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP tahun lalu maupun hasil evaluasi yang dilakukan secara internal/ mandiri sebagai upaya perbaikan yang harus terus dilakukan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil Laporan Hasil Evaluasi yang di keluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Penanaman Modal dan PTSP kabupaten Kutai Kartanegara dari semua komponen penilaian mengalami peningkatan dari tahun 2021. Berdasarkan hasil tersebut inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan rekomendasi/ tindak lanjut atas laporan evaluasi implementasi Sistem AKIP di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

Tabel 15.
Tindak Lanjut atas LHE Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	REKOMENDASI SESUAI LHE AKIP 2022	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	UNIT/SATUAN KERJA PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRESS PENYELESAIAN
1	Melakukan Perbaikan Perencanaan kinerja meliputi : 1.b Melakukan penyusunan Dokumen Kinerja untuk memenuhi standar yang baik untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (Cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (Crosscutting) dengan kinerja perbaikan; 1.b.4 Agar Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/ Sasaran) jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.	1.b DPMPTSP sudah membuat perbaikan Cascading dan Crosscutting sebagaimana yang direkomendasikan Inspektorat (Cascading dan Crosscutting) terlampir 1.b.4 DPMPTSP sudah membuat rumusan (Tujuan/Sasaran) yang jelas menggambarkan kondisi kinerja yang dicapai	DPMPTSP (Sub Bagian Program dan Keuangan)	Selesai
2	Membuat Perbaikan atas Pelaporan Kinerja meliputi : 3.b.5 Agar menyusun Laporan Kinerja dengan menginfokan perbandingan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya 3.b.6 Agar menyusun Laporan kinerja dengan menginfokan realisasi kinerja di level Nasional/ internasional (Benchmark Kinerja) 3.b.8 Agar menyusun Laporan Kinerja dengan menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	3.b.5 DPMPTSP sudah memasukan perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dan untuk tahun 2023 akan kami tambah lagi dengan 2 tahun terakhir 3.b.6 Kami akan melakukan <i>Benchmark</i> kinerja ke tingkat nasional 3.b.8 Dalam laporan Kinerja kami juga sudah mencantumkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	DPMPTSP (Sub Bagian Program dan Keuangan)	3.b.5 dan 3.b.8 selesai 3.b.6 masih dalam proses

III. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Rata-rata realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023 sebesar 155,24%. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja SANGAT TINGGI. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 16.
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Ket
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)	Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)	Triliun Rupiah	1,68	2,01	119,64%	7	9,78	139,71%	7,2	14,809	205,68%	Meningkat
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	87	87,09	100,10%	87,12	91,35	104,86%	87,75	91,96	104,80%	Meningkat
Rata-rata						109,87%			122,28%			155,24%	Meningkat

Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)



Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP



Rata-rata realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2022 sebesar 1833,78% akan tetapi pada perhitungan tabel diatas rata - rata realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 sebesar 122,28% hal ini dikarenakan pada tabel untuk Indikator Kinerja "Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)" *tidak dimasukan* dalam Indikator Kinerja tahun ini dikarenakan bukan merupakan Indikator Kinerja.

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1) Indikator Kinerja ke-1

Target kinerja "Indikator Kinerja ke-1" tahun 2023 capaian kinerja Nilai realisasi investasi sebesar 14,809 Triliun Rupiah dengan pertumbuhan investasi sebesar 51,38% atau capaian kinerja sebesar 205,68% (*Sumber Data: LKPM, Aplikasi NSWI, Koordinator Penanaman Modal*). Capaian Realisasi Investasi Tahun 2023 ini jika dibandingkan dengan Realisasi Investasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 5,029 T atau sebesar 147,23 %. Kenaikan ini di pengaruhi oleh banyaknya investasi ke Ibu Kota Negara (gencarnya pemerintah daerah melakukan promosi Kutai Kartanegara sebagai mitra IKN) dan juga masih tingginya investasi pada sektor sekunder seperti Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan, Kehutanan, Perikanan dan Pertambangan. Sejalan dengan kebijakan investasi yaitu Hilirisasi terutama Investasi Hijau (*Green Invesment*) dan Investari biru (*Blue Invesment*). Adapun hambatan dalam realisasi investasi pada tahun ini yaitu belum adanya Peta Potensi yang berstandar IPRO (*Investment Project To Over*) sehingga ada membuat investor mengurungkan niat untuk berinvestasi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

2) Indikator Kinerja ke-2

Target kinerja "Indikator Kinerja ke-2" tahun 2023 sebesar 87,75 dan realisasinya 91,96 atau capaian kinerja sebesar 104,80% (*sumber data: Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu*). Target kinerja melebihi target dengan kriteria penilaian Sangat tinggi, Terdapat peningkatan sebesar 0,608 dibandingkan dengan IKM tahun 2022. Pengukuran ini dilakukan pada layanan publik yang disediakan/ diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengukuran

dilakukan pada 9 unsur yang oleh Kementerian PAN dan RB telah ditetapkan sebagai parameter dalam mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Setiap unsur diukur dengan 1 (satu) pertanyaan dengan pilihan jawaban tentang preferensi responden berdasarkan pengalaman mengakses layanan publik. Melalui cara ini maka dapat diperoleh gambaran penilaian masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara atas layanan publik yang pernah mereka terima. Adapun *Kendala* yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu : Berdasarkan kinerja menggunakan analisis IPA Matrik dihasilkan dari perpotongan tingkat kepuasan (rata-rata 3,72) dan tingkat kepentingan (rata-rata 3,84) secara keseluruhan : - terdapat 4 (empat) faktor yang perlu diperbaiki segera (prioritas utama) yaitu, U6 (Kompetensi/ kemampuan Petugas); U7 (Perilaku Petugas); U8 (Pelaksanaan penanganan pengaduan, saran dan masukan) serta U9 (Kualitas sarana dan prasarana). - Terdapat 1 (satu) indikator yang perlu DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dipertahankan prestasinya yaitu: Indikator Pelayanan yaitu (U2) kemudahan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan. Hal ini perlu menjadi target dari segenap jajaran DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dipertahankan. - Terdapat 3 (tiga) kurang penting dan kurang memuaskan yaitu: indikator pelayanan kesesuaian persyaratan pelayanan (U1), kecepatan waktu pelayanan (U3), kejelasan jenis-jenis layanan (U5), dan Terdapat 1 (satu) indikator yang termasuk ke kuadran IV pada pelayanan DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Indikator Pelayanan (U4) kesesuaian biaya/ tarif antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang ditetapkan.

Berdasarkan kendala diatas, beberapa saran yang perlu mendapat perhatian dari DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara adalah : 1) DPMPTSP disarankan untuk (i) meningkatkan kinerja terhadap faktor (*indicator*) yang dianggap penting oleh pemohon, namun masih memiliki kinerja rendah; (ii) mempertahankan indikator yang dianggap penting oleh pemohon, yang kinerjanya sudah baik, dan (iii) mengurangi kinerja yang berlebihan pada indikator yang dianggap tidak penting untuk pengambilan keputusan peningkatan kualitas pelayanan perijinan. Faktor-faktor yang perlu

ditingkatkan kinerjanya adalah Kompetensi/ kemampuan Petugas, Perilaku Petugas, Pelaksanaan penanganan pengaduan, saran dan masukan serta Kualitas sarana dan prasarana. Faktor-faktor yang perlu dipertahankan kinerjanya adalah kemudahan sistem, mekanisme dan prosedur. 2) Dalam mengambil kebijakan terhadap faktor-faktor yang terdapat perbedaan persepsi antara pemohon dengan petugas pelaksana DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara, hendaknya dilakukan dengan hati-hati. Untuk faktor-faktor yang terdapat perbedaan persepsi atas tingkat kinerja terdiri dari faktor-faktor (i) kompetensi/kemampuan petugas dan (ii) kualitas sarana dan prasarana. 3) Untuk memperkecil kemungkinan terjadinya perbedaan persepsi antara pemohon dengan petugas pelaksana DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara, beberapa kebijakan dapat ditempat, antara lain (i) memperjelas sistem dan metode pelayanan, (ii) melengkapi sarana prasarana pendukung layanan baik yang utama atau pendukung, seperti antrian, informasi pengaduan, dll, (iii) menyediakan ruang pengaduan untuk dapat mengakomodir pengaduan yang disampaikan secara langsung oleh pemohon, (iv) memberikan pemahaman dan pengendalian perilaku kepada petugas pelayanan bahwa setiap petugas harus siap dan bersedia memberikan informasi yang sama kepada orang yang berbeda (*mental blocking*) karena seyogyanya pemohon tidak mengetahui latar belakang petugas pelaksana, (v) menangani setiap keluhan/ pengaduan/ saran dan masukan dengan cepat dan akurat sehingga dapat diketahui dan dimonitor status penyelesaian setiap ketidaksesuaian yang dilaporkan.

IV. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2023 sebesar **155,24%**. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2022) sebesar **122,28%**. Terjadi peningkatan kinerja sebesar 32,96%. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 17.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan
Realisasi Kinerja Sebelumnya (Tahun 2022)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)	Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)	Triliun Rupiah	7	9,78	139,71%	7,2	14,809	205,68%	Meningkat
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	87,12	91,35	104,86%	87,75	91,96	104,80%	Meningkat
Rata-rata						122,28%			155,24%	Meningkat 32,96%

V. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis.

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 18.
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

No.	Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023
1	Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)	7,2	14,809	205,68%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,75	91,96	104,80%

Analisis atas pencapaian Sasaran Strategis yang di ukur melalui indikator kinerja utama sebagai berikut:

1. Target kinerja “Indikator Kinerja ke-1” tahun 2023 capaian kinerja Nilai realisasi investasi sebesar 14,809 Triliun Rupiah dengan pertumbuhan investasi sebesar 51,38% atau capaian kinerja sebesar 205,68% (*Sumber Data: LKPM, Aplikasi NSWI, Koordinator Penanaman Modal*).

Pencapaian sasaran strategis ini tergambar dengan di raihnya Penghargaan dalam ajang Investment Award 2023 se-Kalimantan Timur, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara raih penghargaan Gubernur, atas kerjasama dan partisipasi dalam pencapaian target dan realisasi investasi di Kalimantan Timur dan Penghargaan Pelayanan Publik 2023 oleh PANRB. Capaian ini diberikan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki realisasi investasi yang mencapai target.

Gambar 21.
Penerimaan Penghargaan 2023

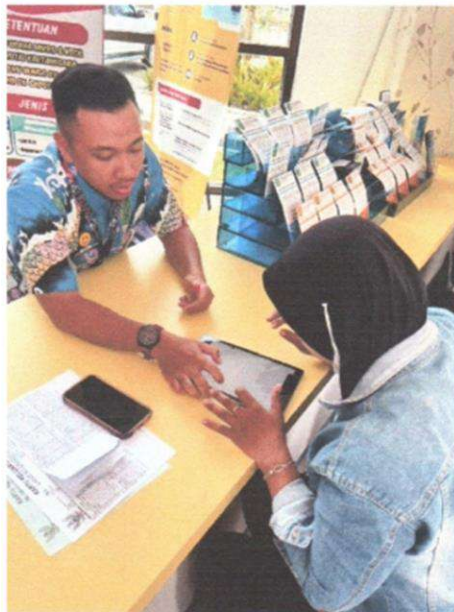


2. Target kinerja “Indikator Kinerja ke-2” tahun 2023 sebesar 87,75 dan realisasinya 91,96 atau capaian kinerja sebesar 104,80% (sumber data: Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Target kinerja melebihi target dengan kriteria penilaian Sangat tinggi, Terdapat peningkatan sebesar 0,608 dibandingkan dengan IKM tahun 2022.

Hal ini ditunjukkan dengan rekapitulasi dari pengunjung/ masyarakat yang memberikan penilaian pada pengukuran survey pada saat kunjungan pada MPP Kutai Kartanegara tahun 2023.

Gambar 22.
Jumlah Kunjungan 2023 dan Survey Masyarakat





VI. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangi persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 19.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Program	Capaian Realisasi Anggaran Program (%)	Efisiensi (%)	Ket.
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi	205,68%	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	99,91	0,09	
				Program Promosi Penanaman Modal	99,31	0,69	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	104,80%	Program Pelayanan Penanaman Modal	91,91	8,09	
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	85,27	14,73	
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	91,55	8,45	

VII. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dimaksud adalah

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal dan Pengendalian Pelayanan Penanaman modal

Indikator kinerja Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal yaitu Jumlah Proyek tahun 2023 dengan target kinerja program sebesar 640 Proyek dan realisasinya sebesar 1703 Proyek atau capaian kinerja sebesar 266,09%.

Tabel 20.
Indikator Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal dan Pengendalian Pelayanan Penanaman Modal

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program
1	Meningkatnya Nilai Realisasi	Tingkat Pertumbuhan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	640	1703	266,09

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program
	Investasi (PMDN/ PMA)	Nilai Investasi				
			Program Promosi Penanaman Modal	260	284	109,23
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	30,47	30,47	100,00

Sumber Data : LKPM, Aplikasi NSWI, Koord. Penanaman Modal DPMPTSP

Gambar 23.
Pendampingan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal





2) Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Indikator kinerja Program Pelayanan Penanaman Modal yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023 dengan target kinerja program sebesar 87,75 dan realisasinya sebesar 91,96 atau capaian kinerja sebesar 104,80%.

Target kinerja tercapai dan melebihi target hal ini dikarenakan berdasarkan hasil analisis kinerja masing- masing indikator survei kepuasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengukuran ini dilakukan pada layanan publik yang disediakan/ diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengukuran dilakukan pada 9 unsur yang oleh Kementerian PAN dan RB telah ditetapkan sebagai parameter dalam mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Setiap unsur diukur dengan 1 (satu) pertanyaan dengan pilihan jawaban tentang preferensi responden berdasarkan pengalaman mengakses layanan publik. Melalui cara ini maka dapat diperoleh gambaran penilaian masyarakat.

Tabel 21.
Indikator Program Pelayanan Penanaman Modal

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	% Realisasi Capaian Kinerja Program
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Pelayanan Penanaman Modal	87,75	91,96	104,80

Sumber Data: Laporan Survey Kepuasan Masyarakat, Koord. PTSP DPMPTSP

Berikut data hasil capaian kinerja program penunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja sasaran strategis tahun 2023

Tabel 22.
Capaian Kinerja Program (Keberhasilan/ Kegagalan)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	640	1703	266,09	Berhasil
			Program Promosi Penanaman Modal	260	284	109,23	Berhasil

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	30,47	30,47	100,00	Berhasil
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Pelayanan Penanaman Modal	1000	11654	1165,40	Berhasil
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	15	15	100,00	Berhasil

VIII. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Realisasi anggaran program/ kegiatan Tahun Anggaran 2023 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 93,48%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 23.
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2023

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Keuangan	Realisasi Fisik	% Fisik
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	86 Nilai	15.476.798.274	14.602.792.387	94,35	94,90	110,35
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran & Evaluasi Kinerja	17 Dokumen	732.274.612	719.653.846	98,28	17	100,00
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	4 Dokumen	198.995.000	198.593.000,00	99,80	4	100,00
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	24.000.000	24.000.000,00	100	1	100,00
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	21.000.000	17.100.000,00	81,43	1	100,00

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Keuangan	Realisasi Fisik	% Fisik
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000	20.000.000,00	100	1	100,00
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000	17.100.000,00	85,5	1	100,00
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9 Laporan	448.279.612	442.860.846,00	98,79	9	100,00
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan	100 Persentase	8.803.041.195	8.225.920.588	93,44	100	100,00
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yg menerima gaji dan tunjangan ASN	84 Orang/Bulan	8.443.928.807	7.876.895.200,00	93,28	84	100,00

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Keuangan	Realisasi Fisik	% Fisik
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD	1 Laporan	94.377.788	91.551.188,00	97,01	1	100,00
1.2.3	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	18.959.800	18.959.800,00	100	1	100,00
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semester SKPD	24 Laporan	233.759.800	226.499.400,00	96,89	24	100,00
1.2.5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	12.015.000	12.015.000,00	100	1	100,00

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Keuangan	Realisasi Fisik	% Fisik
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi BMD	5 Dokumen	136.488.500	100.961.520	73,97	5	100,00
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 Dokumen	14.999.000	14.998.520,00	100,00	1	100,00
1.3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	4 Dokumen	121.489.500	85.963.000,00	70,76	4	100,00
1.4	Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Cakupan Admintrasi Kepengawasan	100 Persentase	736.340.000	724.164.080	98,35	100	100,00
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beseta Atribut Kelengkapannya	2 paket	220.780.000	215.413.500,00	97,57	2	100,00
1.4.2	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dukungan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	100 Dokumen	28.060.000	26.305.680,00	93,75	100	100,00
1.4.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Fungsi	15 Orang	75.000.000	71.828.900,00	95,77	15	100,00

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Keuangan	Realisasi Fisik	% Fisik
		pendidikan dan pelatihan						
1.4.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	102 Orang	412.500.000	410.616.000,00	99,54	102	100,00
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Adminstrasi Umum	100 Persentase	2.061.935.145	2.033.810.163	98,64	100	100,00
1.5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	70 paket	270.000.000	258.705.400,00	95,82	70	100,00
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	40 paket	350.000.000	345.145.750,00	98,61	40	100,00
1.5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	22 paket	100.000.000	96.979.500,00	96,98	22	100,00
1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	30.000.000	29.920.000,00	99,73	1	100,00

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Keuangan	Realisasi Fisik	% Fisik
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	400 Laporan	1.261.935.145	1.259.319.513,00	99,79	400	100,00
1.5.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	500 Dokumen	50.000.000	43.740.000,00	87,48	500	100,00
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan BMD	100 Persentase	768.606.000,00	751.254.000,00	97,74	100	100,00
1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	46 Unit	768.606.000,00	751.254.000,00	97,74	46	100,00
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa	100 Persentase	1.915.262.822	1.732.427.460	90,45	100	100,00
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	10.450.500	7.478.500,00	71,56	2	100,00
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	135.000.000	106.071.051,00	78,57	12	100,00

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Keuangan	Realisasi Fisik	% Fisik
1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	209.480.000	204.706.940,00	97,72	3	100,00
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.560.332.322	1.414.170.969,00	90,63	12	100,00
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan BMD	100 Persentase	322.850.000	314.600.730	97,44	100	100,00
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan pajaknya	48 unit	263.620.000	257.522.730,00	97,69	48	100,00
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	60 unit	59.230.000	57.078.000,00	96,37	60	100,00
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Proyek (PMA/PMDN)	640 Proyek	1.000.000.000	999.081.840,00	99,91	1703	266,09

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Keuangan	Realisasi Fisik	% Fisik
2.1	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian dan Peta Potensi Invrstasi	3 Dokumen	1.000.000.000	999.081.840,00	99,91	3	100,00
2.1.1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha kabupaten/Kota	3 Dokumen	1.000.000.000	999.081.840,00	99,91	3	100,00
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor (PMA/PMDN)	260 Investor	1.295.494.400	1.286.579.471,00	99,31	284	109,23
3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Industri/Hilirisasi	260 Investor	1.295.494.400	1.286.579.471,00	99,31	284	109,23
3.1.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan kabupaten/Kota	2 Dokumen	300.000.000	298.969.600,00	99,66	2	100,00
3.1.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan PromosiPenanaman Modal Kabupaten/Kota	5 Dokumen	995.494.400	987.609.871,00	99,21	4	80,00
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Penerbitan Izin	1000 Izin	1.250.000.000	1.148.907.057	91,91	11654	1165,40

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Keuangan	Realisasi Fisik	% Fisik
4.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Indek Kepuasan Masyarakat	88 Nilai	1.250.000.000	1.148.907.057	91,91	89,35	101,53
4.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi Secara Elektronik	2000 Pelaku Usaha	300.000.000	283.066.926,00	94,36	2000	100,00
4.1.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	300 Kegiatan Usaha	650.000.000	578.760.000,00	89,04	300	100,00

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Keuangan	Realisasi Fisik	% Fisik
4.1.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang Yang Memperoleh Layanan Konsultasi Dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Non Perizinan	100 Orang	200.000.000	188.018.131,00	94,01	100	100,00
4.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	12 Kegiatan Usaha	100.000.000	99.062.000,00	99,062	12	100,00
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi	30,47 Persentase	1.681.700.000	1.433.987.529	85,27	30,47	100,00
5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian PMA/PMDN	550 Pelaku Usaha/Kegiatan	1.681.700.000	1.433.987.529	85,27	550	100,00

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Keuangan	Realisasi Fisik	% Fisik
5.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	100 Kegiatan usaha	350.000.000	288.975.536,00	82,56	100	100,00
5.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	300 Pelaku Usaha	935.718.800	859.917.561,00	91,90	300	100,00
5.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan	100 Kegiatan usaha	395.981.200	285.094.432,00	72,00	100	100,00
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Aplikasi	15 Aplikasi	6.030.445.366	5.521.091.860,00	91,55	15	100,00

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Keuangan	Realisasi Fisik	% Fisik
6.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Maintance Aplikasi	15 Aplikasi	6.030.445.366	5.521.091.860,00	91,55	15	100,00
6.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji Dan Dimanfaatkan	Jumlah Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji Dan Dimanfaatkan	4436 Dokumen	6.030.445.366	5.521.091.860,00	91,55	4436	100,00
		JUMLAH		26.734.438.040	24.992.440.144	93.48%		

Sedangkan pada tahun sebelumnya (2021) realisasi anggaran sebesar 87,51%, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 24.
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun Sebelumnya (2022)

No	Sasaran Organisasi Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu
								(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9 = (6-8)
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	80,00	14.183.258.420		87,86	12.779.302.506	87,81	1.406.066.527
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			136.600.000			135.600.000	99,44	3.110.613
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	76.300.000	2	Dokumen	76.300.000	100	-
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD		1 Dokumen	6.700.000	1	Dokumen	6.700.000	100	-
		Koordinasi Dan Penyusunan DPA - SKPD		1 Dokumen	8.800.000	1	Dokumen	8.800.000	100	-
		Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD		1 Dokumen	8.800.000	1	Dokumen	8.800.000	100	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD		6 Dokumen	36.000.000	6	Dokumen	35.000.000	97,22	1.000.000
		Adiminstrasi Keuangan Perangkat Daerah			10.111.604.099			8.978.695.551	90,41	1.132.908.548

No	Sasaran Organisasi Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu
								(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9 = (6-8)
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN DPMPTSP	91 Org	9.683.704.099	91	Org	8.657.060.551	89,40	1.026.643.548
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	1 Dokumen	19.400.000	1	Dokumen	19.400.000	100	-
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	110.200.000	5	Dokumen	110.075.000	99,89	125.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	285.000.000	3	Dokumen	178.860.000	62,76	106.140.000
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	13.300.000	1	Dokumen	13.300.000	100	-
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			26.999.000			26.838.600	99,47	160.400
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	14.999.000	1	Dokumen	14.838.600	98,93	160.400
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	12.000.000	2	Dokumen	12.000.000	100	-
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			187.849.500			185.099.000	98,81	2.750.500
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Aparatur	55.044.000	15	Aparatur	54.754.000	99,47	290.000

No	Sasaran Organisasi Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu
								(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9 = (6-8)
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan	50 Aparatur	132.805.500	50	Aparatur	130.345.000	98,15	2.460.500
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.506.335.145			1.496.944.468	98,82	9.390.677
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35 Unit	145.100.000	35	Unit	143.329.920	98,78	1.770.080
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis bahan logistik	25 Jenis	320.739.145	25	Jenis	320.374.000	99,89	365.145
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah jenis barang cetakan	22 Jenis	100.000.000	22	Jenis	99.798.580	99,80	201.420
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi/Konsultasi	200 OK	726.196.000	200	OK	719.960.968	99,14	6.235.032
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Kegiatan	500 Dokumen	200.000.000	500	Dokumen	199.841.000	99,92	159.000
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Kegiatan/Berita	24 Berita	14.300.000	24	Berita	13.640.000	95,38	660.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			395.867.000			390.715.450		5.151.550
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	4 Paket	395.867.000	4	Paket	390.715.450	98,70	5.151.550
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.495.153.676			1.244.029.897	92,14	251.123.779

No	Sasaran Organisasi Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu
								(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9 = (6-8)
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai/Prangko	2500 Lembar	5.995.000	2500	Lembar	5.616.875	93,69	378.125
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Priode Pembayaran	12 Bulan	120.000.000	12	Bulan	113.094.378	94,25	6.905.622
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit	50 Jenis	89.480.000	50	Jenis	89.149.970	99,63	330.030
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pendukung Non ASN	49 Orang	1.279.678.676	49	Orang	1.036.168.674	80,97	243.510.002
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			322.850.000			321.379.540	99,27	1.470.460
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pemeliharaan Kendaraan	48 Unit	263.620.000	48	Unit	262.839.540	99,70	780.460
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit	60 Unit	59.230.000	60	Unit	58.540.000	98,84	690.000
2	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi	1,71	1.200.000.000		90,63	1.185.285.899	98,34	14.714.101
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			350.000.000			340.518.356	97,29	9.481.644

No	Sasaran Organisasi Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu
								(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9 = (6-8)
		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		1 Dokumen	350.000.000	1	Dokumen	340.518.356	97,29	9.481.644
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			850.000.000			844.767.543	99,39	5.232.457
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		2 Dokumen	350.000.000	2	Dokumen	348.067.543	99,45	1.932.457
		Pernyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	1	Dokumen	496.700.000	99,34	3.300.000
		Program Promosi Penanaman Modal			700.000.000			659.285.998		40.714.002
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			700.000.000			659.285.998	92,60	40.714.002
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal		1 Dokumen	200.000.000	1	Dokumen	177.776.500	88,89	22.223.500
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Mengikuti pameran promosi dalam daerah, luar daerah, dalam negeri dan luar negeri	4 Event	500.000.000	4	Event	481.509.498	96,30	18.490.502
		Program Pelayanan Penanaman Modal			1.000.000.000			961.853.687		38.146.313

No	Sasaran Organisasi Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu
								(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9 = (6-8)
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			1.000.000.000			961.853.687	96,60	38.146.313
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		500 Pemohon	300.000.000	500	Pemohon	267.750.687	89,25	32.249.313
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal		500 izin	300.000.000	500	Izin	299.330.000	99,78	670.000
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		500 Pelaku Usaha	200.000.000	500	Pelaku Usaha	194.773.000	97,39	5.227.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		500 Izin	200.000.000	500	Izin	200.000.000	100	-
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			1.298.133.000			1.055.166.427		242.966.573
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Dearah Kabupaten/Kota			1.298.133.000			1.055.166.427	87,37	242.966.573

No	Sasaran Organisasi Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu
								(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9 = (6-8)
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		50/ 200 Perusahaan/ UMKM	200.000.000	50/ 200	Perusahaan/ UMKM	200.000.000	100	-
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		50/ 400 Perusahaan/ UMKM	418.133.000	50/ 400	Perusahaan/ UMKM	394.713.429	94,40	23.419.571
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		50/ 200 Perusahaan/ UMKM	680.000.000	50/ 200	Perusahaan/ UMKM	460.452.998	67,71	219.547.002
3	Kualitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,12	7.744.709.664		91,35	6.311.496.486		1.433.213.178
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah			7.744.709.664			6.311.496.486		1.433.213.178
		Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan	1 Aplikasi	7.744.709.664	1	Aplikasi	6.311.496.486	81,49	1.433.213.178
		Jumlah			26.126.101.084			22.952.391.003	87,85	3.173.710.081

Dengan demikian, pada tahun 2023 terjadi peningkatan realisasi anggaran sebesar 5,63% antara realisasi anggaran tahun 2022 ke tahun 2023.

BAB IV PENUTUP

I. Kesimpulan

Secara umum capaian kinerja Dinas Penanaman Modal 155,24% dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 rata-rata sebesar (**Sangat Tinggi**), dengan rincian sebagai berikut:

1) Capaian kinerja untuk indikator Kinerja Ke-1 Tahun 2023

“Nilai realisasi investasi” sebesar 14,809 Triliun Rupiah dengan pertumbuhan investasi sebesar 51,38% atau capaian kinerja sebesar 205,68% (*Sumber Data: LKPM, Aplikasi NSWI, Koordinator Penanaman Modal*). Capaian Realisasi Investasi Tahun 2023 ini jika dibandingkan dengan Realisasi Investasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 5,029 T atau sebesar 147,23 %. Kenaikan ini di pengaruhi oleh banyaknya investasi ke Ibu Kota Negara (gencarnya pemerintah daerah melakukan promosi Kutai Kartanegara sebagai mitra IKN) dan juga masih tingginya investasi pada sektor sekunder seperti Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan; Kehutanan; Perikanan dan Pertambangan. Sejalan dengan kebijakan investasi yaitu Hilirisasi terutama Investasi Hijau (*Green Invesment*) dan Investari biru (*Blue Invesment*).

2) Capaian kinerja “Indikator Kinerja ke-2” Tahun 2023

“Indeks Kepuasan Konsumen” sebesar 87,75 dan realisasinya 91,96 atau capaian kinerja sebesar 104,80% (*sumber data: Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu*). Target kinerja melebihi target dengan kriteria penilaian Sangat tinggi,

Terdapat peningkatan sebesar 0,608 dibandingkan dengan IKM tahun 2022. Pengukuran ini dilakukan pada layanan publik yang disediakan/diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengukuran dilakukan pada 9 unsur yang oleh Kementerian PAN dan RB telah ditetapkan sebagai parameter dalam mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Setiap unsur diukur dengan 1 (satu) pertanyaan dengan pilihan jawaban tentang preferensi responden berdasarkan pengalaman mengakses layanan publik.

Capaian kinerja tahun 2023 **meningkat dari tahun sebelumnya**, dimana pada tahun 2023 capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar 155,24% dan pada tahun sebelumnya (Tahun 2022) capaian kinerjanya sebesar 122,28% atau terjadi peningkatan kinerja sebesar 32,95%.

II. Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2023, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kualitas SDM Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
- 2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan dengan penggunaan Ilmu Teknologi (IT);
- 3) Pengendalian Penanaman Modal menuju Hilirisasi Sumber Daya Alam terutama *Green Investment* dan *Blue Investment*;

- 4) Menyelesaikan Peraturan Daerah (PERDA) mengenai pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal dan membuat Peraturan Bupati (PERBUP) serta membuat Standar Operasional Prosedur tentang pemberian Fasilitas /insentif penanaman modal
- 5) Membuat kajian Investasi berstandar IPRO (*Investment Project To Over*) untuk menarik minat Penanaman Modal terutama pada bidang yang diunggulkan pada RPJMD yaitu Pertanian dalam arti luas, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Kutai Kartanegara, Februari 2024
Kepala
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Kutai Kartanegara,



ALFIAN NOOR, SE., M. LING.
Pembina Utama Muda- IV/c
NIP. 19690113 199503 1 005



L K J I P 2023



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG D LANTAI DASAR
JALAN : WOLTER MONGONSIDI TENGGARONG
KODEPOS 75511**